

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiono, Herlien. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartanto, J. Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Handari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Komar Andasasmita, 1990, *Buku Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat Cetakan Kedua, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 1981. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2013, *Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center for Dokumentation Studies of Bussiness (CDBSL), Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Asis Safiodien. 1987. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1991. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik, 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soharto, Bohar, 1989. *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Taristo, Bandung.
- Soemardjono, Maria S. W., 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta.

Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 2003. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.

Usman Adji, Sution, 1989. *Kawin Lari dan Kawin antar agama*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 hasil uji materiil Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal dan Makalah

Riana, Epa, “Tinjauan Yuridis Penetapan Hakim atas Perjanjian Kawin Yang dibuat setelah Perkawinan Dalam Perkawinan yang dibuat setelah Perkawinan Dalam Campuran (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel””, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Taira, Khrisna Satria Nugraha, “Perjanjian kawin pada gelahang menurut adat Bali di Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Wawan, Setiawan, Kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti tertulis dan autentik menurut hukum positif di Indonesia, *media Notariat*, INI, Menor No. 34-35-36-37 Jan-Apr-Juli-Oktober , 1995.